

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KECAMATAN
SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

OLEH:

HERLIANSYAH
11575103093



**PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2019

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UPH PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KECAMATAN
SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat mengikuti ujian oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

OLEH:

**HERLIANSYAH
11575103093**



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : HERLIANSYAH
NIM : 11575103093
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPT
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH KECAMATAN SIAK KECIL
KABUPATEN BENGKALIS

Disetujui oleh :

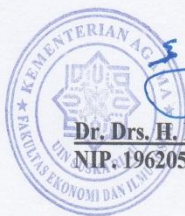
Pembimbing

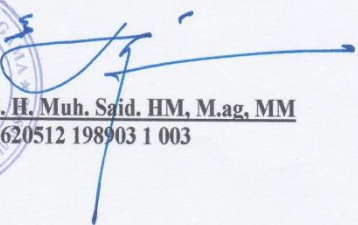

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
NIK. 130712074

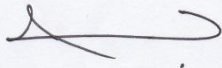
Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua jurusan
Ilmu Administrasi Negara




Dr. Drs. H. Muh. Saïd. HM, M.ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

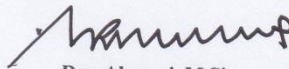
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HERLIANSYAH
NIM : 11575103093
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPT
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH KECAMATAN SIAK KECIL
KABUPATEN BENGKALIS
TANGGAL UJIAN : 27 SEPTEMBER 2019

Disetujui oleh :

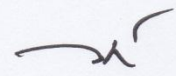
KETUA PENGUJI



Drs. Almasri, M.Si
NIP. 19670801 200501 1 007

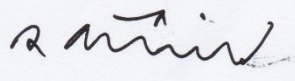
Mengetahui :

PENGUJI I



Muslim, S.Sos, M.Si
NIP. 19820205 201503 1 002

PENGUJI II



Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si
NIK. 130717059

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KECAMATAN
SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh :

HERLIANSYAH

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan menggunakan peraturan Bupati Bengkalis nomor 38 tahun 2017. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian di analisa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal Pengawasan barang beredar dipasar belum maksimal karena masih banyak pasar-pasar yang jauh dari kecamatan tidak mendapatkan pengawasan. Untuk Pembinaan dan Pengembangan terhadap Industri Kecil belum maksimal ini terlihat masih banyaknya industri kecil yang tidak mendapatkan program-program pembinaan. UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Hanya mengirim para IKM untuk mengikuti pelatihan di kabupaten tanpa membuat program pelatihan untuk kecamatan. hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu sumber daya manusia, keterampilan (skill), sarana dan prasarana dan dana.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Tugas dan Fungsi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"

Puji syukur kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan rasa syukur tanpa batas penulis persembahkan kehadiran-Nya yang telah memberikan nikmat iman, ihsan dan salam. Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat islam sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini tepat pada waktunya yang penulis beri judul **"ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS"**.

Pembuatan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada orang tua tercinta ibunda Herlina, S.Pd dan ayahanda Zanirwan, S.Pd, terima kasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu membimbing, dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- menwujudkan cita-cita hingga dapat menjadi seorang sarjana. Dengan penuh pengorbanan kedua orang tua, doa serta dukungan untuk keberhasilan ananda hingga saat ini, untuk skripsi ini di persembahkan untuk kedua oang tua ananda yang sangat ananda sayangi.
- Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, M.Kp selaku sekretaris Jurusan Ilmu Administasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Muammar alkadafi, S.Sos, M.Si selaku penasehat Akademik.
 6. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si selaku dosen konsultasi dan dosen pembimbing yang memberikan bimbingan, informasi, serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
 7. Bapak dan ibu dosen serta pegawai di jurusan Ilmu Administasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada keluarga Besar UPT perlindungan Konsumen dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
9. Untuk Sanita Agustina, S.P.d yang selalu mendampingi penulis selama menyelesaikan sma dan kuliah dan selalui mensupport penulis supaya menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk adik kandung Nadila Ramadhani dan Nadia Ramadhani terima kasih atas dukungan, semangat dan motivasinya.
11. Untuk sepupu Healfian Azmir, S.Pd dan Afrianto, S.Sos Ramadhani terima kasih atas dukungan, semangat dan motivasinya.
12. Untuk keluarga besar ANA G 2015 yang selalu memberi semngat, dukungan,dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk keluarga besar Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksemana Kabupaten Bengkalis.

Semoga semua motivasi, semangat, doa serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap karya tulis ini dapat bermamfaat. *Amin amin yarobbal alamin.*

Pekanbaru, Juli 2019
Penulis,

HERLIANSYAH

NIM. 11575103093

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Konsep Pelayanan Publik.....	16
2.1.1 Asas Pelayanan Publik	17
2.1.2 Standar pelayanan Publik	17
2.2 Konsep Pelaksanaan.....	19
2.3 Konsep Tugas Pokok dan Fungsi	22
2.3.1 Tugas Pokok	22
2.3.2 Fungsi	23
2.4 Pandangan Islam.....	31
2.5 Penelitian Terdahulu.....	32
2.6 Definisi Konsep	34
2.7 Konsep Operasional.....	35
2.8 Kerangka pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.2 Jenis Penelitian	37
3.3 Jenis dan Sumber Data	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informan Penelitian	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisa Data	41
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Gambaran umum Kabupaten Bengkalis	43
4.1.1 Sejarah Kabupaten Bengkalis	43
4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis	44
4.2 Sejarah singkat UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	45
4.2.1 Visi dan Misi UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	46
4.2.2 Struktur Organisasi UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	47
4.2.3 Uraian tugas dan fungsi UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	48
BAB V HASIL PENELITIAN	
5.1 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	50
5.1.1 Pengawasan	51
5.1.1.1 Pengawasan Berkala	53
5.1.1.2 Pengawasan Khusus	57
5.1.2 Pembinaan	60
5.1.2.1 Pembinaan Industri Kecil	62
5.1.2.2 Pembinaan Industri Menengah	67
5.1.3 Pengembangan	68
5.1.3.1 Pengembangan Industri Menengah	69
5.1.3.2 Pengembangan Industri Menengah	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

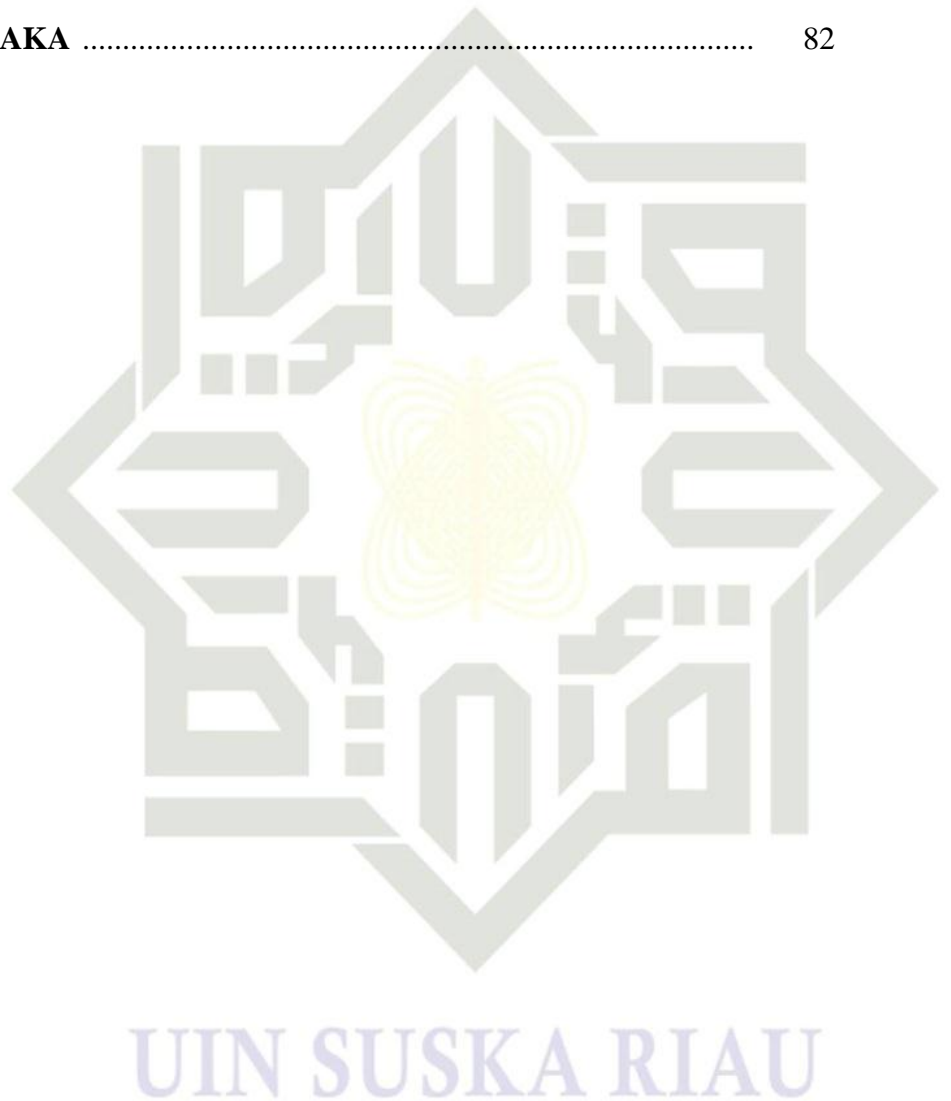
5.2 Hambatan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	75
--	----

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	80
6.2 Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	----

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Aduan Masyarakat terkait Perlindungan Konsumen	6
Tabel 1.2 Daftar Pasar di Kecamatan Siak Kecil	7
Tabel 1.2 Daftar jumlah pedagang yang dilakukan pengawasan	8
Tabel 1.3 Daftar Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Kecil	9
Tabel 2.1 Konsep Operasional	35
Tabel 3.1 Daftar Informan penelitian	39
Tabel 5.1 Daftar jumlah pedagang Pasar yang dilakukan Pengawasan	57
Tabel 5.2 Daftar jumlah IKM yang di kirim untuk mengikuti pelatihan pembinaan di kabupaten	67

UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang luas, dalam melakukan pembangunan yang dilaksanakan mulai dari pusat sampai ke daerah. Pembangunan di Indonesia pada saat ini tidak hanya diarahkan kepada tercapainya hasil fisik dan kesejahteraan materil, akan tetapi mencakup segala bidang yang biasa di sebut pembangunan nasional. Pembangunan nasional akan berhasil jika diimbangi dengan administrasi pemerintahan yang baik dan berdaya guna serta efisien dan efektif dalam melakukan pembangunan.

pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh sebab itu pembangunan yang dilakukan haruslah melalui suatu perencanaan yang baik dan dilaksanakan secara bertahap dan terarah, dengan menggerakkan segenap potensi yang ada, terutama melalui pembangunan organisasi yang merupakan sector yang sangat menunjang kelancaran dari aspek yang akan di bangun.

Supaya dapat mewujudkan itu semua, pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya haruslah meningkatkan kinerjanya sebagai aparatur pemerintahan dalam hal melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu para aparatur Negara tersebut haruslah menguasai hal-hal tentang tugas pokok dan fungsi bidang kerja masing-masing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi. Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, tugas adalah kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang dibebankan, maupun perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Dari sudut pandang organisasi tugas-tugas didefinisikan sebagai perwujudan dari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap anggota organisasi sebagai upaya dalam pencapaian tujuan.

Setiap anggota organisasi, karyawan ataupun pegawai memiliki tugasnya masing-masing dalam organisasi serta wajib untuk menjalankan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka tugas-tugas tersebut harus di rancang dengan benar dan dapat di jabarkan secara jelas.

Tugas pokok dan fungsi sangat berkaitan erat dengan efektivitas kerja organisasi. Menurut Robbins (1995), keefektifan didefinisikan sejauh mana organisasi dapat mengujudkan tujuan-tujuannya. Berdasarkan penjelasan tersebut Gibson (1996) mengemukakan bahwa organisasi terdiri dari individu dan kelompok, karena itu efektivitas organisasi juga termasuk efektivitas individu dan kelompok. Dengan adanya sinergi antara efektivitas individu dan kelompok maka organisasi akan memperoleh tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tugas pokok dan fungsi yang ada didalam organisasi dapat berpengaruh terhadap efektivitas individu dan kelompok.



Efektivitas individu diwujudkan berdasarkan sejauh mana individu atau pegawai tersebut mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan benar dan konsisten. Oleh karena itu, agar tercipta tugas pokok dan fungsi untuk para pegawai yang tepat demi tercapainya tujuan organisasi, maka perlu memanfaatkan konsep perancangan atau desain pekerjaan yang baik dan benar.

Tugas pokok dan fungsi pegawai yang telah dirancang dengan benar tersebut secara jelas termuat dalam sebuah uraian pekerjaan. Uraian Pekerjaan dalam sebuah organisasi baik swasta maupun pemerintah merupakan kumpulan informasi mengenai pekerjaan atau garis besar mengenai apa saja kewajiban, tanggung jawab dan wewenang yang dipegang serta harus dilaksanakan oleh para pegawai. Selain itu, uraian pekerjaan juga menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan tugas-tugas tersebut demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan di atas, uraian pekerjaan yang memuat tugas pokok dan fungsi untuk para pegawai tersebut memiliki peran yang cukup penting dalam organisasi sehingga harus disusun secara jelas dan terarah. Hal tersebut dikarenakan meskipun perancangan pekerjaan telah dilakukan dengan benar, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak ditetapkan secara jelas sebagai pedoman kerja pegawai, maka dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut akan tidak optimal dan konsisten. Pekerjaan yang telah dibuat akan tidak memiliki konsistensi mengenai siapa sebenarnya pegawai yang tepat sebagai pelaksana tugas tersebut, tidak adanya pemahaman pegawai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengenai prosedur pelaksanaan tugas, serta apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Agar uraian pekerjaan menjadi jelas dan dapat dipahami oleh setiap pegawai, uraian pekerjaan tersebut harus mempertimbangkan beberapa unsur yang terdapat dalam deskripsi pekerjaan. Adapun informasi-informasi yang termuat dalam deskripsi pekerjaan berdasarkan KEP/29/M.PAN/6/2004 antara lain nama jabatan, ringkasan tugas, hasil kerja, bahan dan peralatan kerja, rincian tugas, serta syarat jabatan.

Suatu uraian pekerjaan, yang mana di dalamnya tersebut dapat menjelaskan informasi-informasi pekerjaan tersebut dengan tepat maka akan menghasilkan suatu uraian pekerjaan yang jelas sehingga membuat para pegawai dapat memahami tugas-tugasnya dengan baik, tidak mengalami banyak hambatan kerja sebab tugas-tugas yang dijalankan sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya, tiap-tiap pegawai juga memiliki batasan kerjanya tersendiri sehingga tidak dapat saling mencampuri tugas satu sama lain, tidak adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas organisasi, serta komunikasi yang terbentuk dengan baik karena adanya hubungan kerjasama yang baik antarpegawai. Namun, untuk memenuhi elemen-elemen dalam uraian pekerjaan tersebut, diperlukan informasi-informasi yang ada dalam organisasi. Oleh karena itu, sebelum dilakukan penyusunan uraian pekerjaan, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan informasi melalui analisis pekerjaan.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UPT Perlindungan Konsumen Dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil merupakan suatu Organisasi Pelaksana teknis dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Terbentuklah Unit Pelaksana Teknis perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Berkedudukan di Desa LubukMuda , wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Siak Kecil.

Terbentuknya UPT ini juga tidak terlepas dari di keluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen tersebut dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Untuk melaksanakan tugasnya Unit Pelaksana Teknis perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lingkungan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Kecamatan serta dengan instansi lain di luar Kecamatan Sesuai dengan tugas masing-masing.

Selama periode 2017-2018 ada beberapa aduan masyarakat terkait Perlindungan Konsumen yang masuk ke UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis antara lain:

Tabel 1.1 Aduan Masyarakat terkait Perlindungan Konsumen

No	Tahun	Aduan Masyarakat
1	2017	1. Kelangkaan Gas LPG 3 KG
		2. Keamanan barang penjual di pasar
		3. Makanan dan Minuman yang kadaluarsa
		4. Pemungutan retribusi parkir di pasar
2	2018	1. Makanan dan Minuman yang kadaluarsa
		2. Kelangkaan Gas LPG 3 KG
		3. Kebersihan Pasar
		4. Ukuran liter pada pertamini elektronik
		5. Sarden kalengan yang mengandung cacing

Sumber : UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil.

Berdasarkan tabel di tersebut dapat di lihat bahwa selama periode 2017-2018 banyaknya masuk aduan masyarakat terkait dengan perlindungan konsumen yang paling menjadi topik utama pada tahun 2018 yaitu di temukannya sarden kalengan yang mengandung cacing yang berbahaya bagi kesehatan. Mendapat laporan ini dinas perdagangan dan perindustrian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten bengkalis melalui UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah se kabupaten bengkalis melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional , warung-warung, dan swalayan yang ada di kabupaten bengkalis untuk mencari merek-merek sarden kalengan yang mengandung cacing untuk di tarik dari pasaran.

Dalam melakukan pengawasan barang dan jasa di pasar, ada beberapa pasar yang di awasi oleh UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Dapat di lihat di tabel bawah ini :

Tabel 1.2 Daftar Pasar di Kecamatan Siak Kecil

No	Pasar	Desa
1	Pasar desa lubuk muda	Lubuk muda
2	Pasar desa tanjung belit	Tanjung Belit
3	Pasar desa koto raja	Koto Raja
4	Pasar desa lubuk garam	Lubuk Garam
5	Pasar desa langkat	Langkat
6	Pasar desa sadar jaya	Sadar Jaya
Jumlah		6

Sumber : UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil.

Pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kec. Siak Kecil tidak maksimal dilakukan karena hanya melakukan pengawasan dua kali dalam sebulan sedangkan pasar yang ada di kecamatan Siak Kecil yang berjumlah enam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasar menurut saya sangat tidak efektif karena masih banyak pedagang pasar yang tidak dilakukan pengawasan ini terlihat dari data pengawasan yang saya dapat dari UPT Perlindungan konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kec. Siak Kecil.

Tabel 1.3 Daftar jumlah pedagang Pasar yang dilakukan pengawasan

Tahun	Pasar	Jumlah pedagang yang dilakukan pengawasan
2017	1. Pasar desa Lubuk Muda	15
	2. Pasar desa Tanjung Belit	10
	3. Pasar desa Koto Raja	15
	4. Pasar desa Lubuk Garam	12
	5. Pasar desa Langkat	10
	6. Pasar desa Sadar Jaya	8
	Jumlah	70
2018	1. Pasar desa Lubuk Muda	20
	2. Pasar desa Tanjung Belit	12
	3. Pasar desa Koto Raja	15
	4. Pasar desa Lubuk Garam	12
	5. Pasar desa Langkat	12
	6. Pasar desa Sadar Jaya	10
	Jumlah	81

Sumber : UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pengawasan barang yang beredar di pasar yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil tidak maksimal karena pedagang yang dilakukan pengawasan hanya sebagian kecil saja yang berjualan di pasar tersebut ini membuat masih banyak pedagang yang tidak dilakukan pengawasan.



Pengembangan industri kecil dan menengah di kecamatan siak kecil ada beberapa industri yang di kembangkan oleh masyarakat di kecamatan siak kecil diantaranya dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 1.4 Daftar Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Kecil

No	Desa/Kelurahan	Industri Kecil	Industri Menengah
1	Langkat	1	-
2	Sepotong	2	-
3	Sungai Siput	1	-
4	Lubuk Muda	2	-
5	Lubuk Garam	2	-
6	Tanjung Belit	3	-
7	Lubuk Gaung	2	-
8	Sadar Jaya	1	-
9	Muara Dua	-	-
10	Bandar Jaya	-	-
11	Sungai Linau	-	-
12	Tanjung Damai	-	-
13	Sumber Jaya	1	-
14	Sungai Nibung	-	-
15	Koto Raja	2	-
16	Liang Banir	1	-
17	Tanjung Datuk	1	-
	Jumlah	19	

Sumber Data : UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Tabel diatas menjelaskan bahwa industri yang berkembang di kecamatan siak adalah Industri Kecil dengan jumlah 19 industri. Tetapi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan hasil observasi penulis masih banyak industri-industri di Kecamatan siak kecil yang tidak terdaftar dan mereka berdiri sendiri tanpa adanya peran pemerintah. Industri kecil ini industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang, yang dimana industri kecil yang ada di Kecamatan siak kecil di antaranya : industri pengolahan kayu, industri pengolahan anyaman rotan, industri makanan, industri pembuatan batu bata, industri pembuatan batako.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2017 Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis merupakan pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas perdagangan dan Perindustrian di Kecamatan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Pengembangan industri kecil dan menengah. Seperti :

1. Melakukan perhimpunan data yang berkaitan Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di kecamatan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa di pasar dan tempat penyimpanan (gudang);
3. Melaksanakan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen dan Pelaku usaha;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Industri kecil dan menengah;
5. Membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengawasan dan menjaga kebersihan pasar serta pemungutan Retribusi pasar;
6. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
7. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap ASN dan personil UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan menengah; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas

Dapat diketahui bersama bahwa pada umumnya hasil kerja pegawai pemerintahan saat ini kurang memberikan hasil yang optimal terhadap kepentingan masyarakat maupun dalam upaya pencapaian tujuan instansinya atau dapat dikatakan kurang memuaskan. Adapun fenomena yang penulis temukan pada saat melakukan penelitian awal di UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah tersebut, dimana tugas pokok yang dibebankan tidak berjalan maksimal sebagaimana mestinya diantaranya adalah:

1. Pelaksaaan pengawasan barang yang beredar dan jasa di pasar dan tempat penyimpanan. Ini terlihat dari beberapa aduan masyarakat yang masuk bahwa masih banyak produk makanan dan minuman yang beredardi pasar yang kadaluarsa yang luput dari pengawasan.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah, dalam hal pembinaan UPT hanya Menghimpun data ke



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian di tingkat kabupaten. Yang melakukan program pembinaan adalah dinas yang berada di kabupaten di tambah lagi pendanaan untuk program pembinaan di kecamatan tidak ada. Ini membuat tugas pembinaan di UPT tidak berjalan. selain itu terdapat aktivitas kerja pegawai yang tidak merata, rendahnya disiplin kerja pegawai .

Oleh karena permasalahan tersebut, penulis mengambil judul sebagai berikut: **“ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS”** dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penguraian tugas pokok dan fungsi yang dijalankan pada Kepala UPT dan Kelompok Fungsional di UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil, bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi oleh pegawai tersebut, serta hal-hal yang terkait dalam pelaksanaannya baik itu mengenai hal-hal pendukung, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan TUPOKSI tersebut, yang secara tidak langsung dapat mencerminkan bagaimana konsistensi dari tugas pokok dan fungsi yang selama ini jalankan oleh pegawai dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di UPT Perlindungan konsumen dan pengembangan industri kecil dan menengah Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di UPT Perlindungan konsumen dan pengembangan industri kecil dan menengah Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di UPT Perlindungan konsumen dan pengembangan industri kecil dan menengah Kec. Siak Kecil Kab Bengkalis.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di UPT Perlindungan konsumen dan pengembangan industri kecil dan menengah Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
 - a. Dapat memahami arti penting adanya tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) di suatu lembaga.
 - b. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) di suatu lembaga.
2. Bagi lembaga
 - a. Dapat di jadikan evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme pegawai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dapat dijadikan gambaran oleh pemimpin dalam meningkatkan kinerja pegawai dan staff.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini secara umum penulis membagi sistematika penulisan dalam enam BAB dimana masing-masing BAB diuraikan sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

BAB ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, mamfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

BAB ini terdiri dari konsep, definisi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor, pandangan islam ,hipotesa.-

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB ini berisi lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, infoman penelitian dan metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu sejarah singkat tentang UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Bengkalis, keadaan Geografis, struktur atau peta jabatannya.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan dan menganalisa jawaban responden tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BAB VI : PENUTUP

Pada Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian membangun bagi objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pelayanan publik

Menurut Lijan Poltak S (2006:5), istilah publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, Negara. Kata public sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak dan ramai. Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan diatas, maka pulik dapat didefinisikan sebagai masyarakat luas atau umum.

Istilah pelayanan umum di Indonesia seringkali di identifikasikan dengan pelayanan public sebagai terjemahan dari public service. Di Indonesia, konsepsi pelayanan administrasi pemerintahan seringkali di gunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsepsi pelayanan perizinan.

Menurut AG. Subarsono seperti dikutip oleh Agus Dwiyanto (2005:141) pelayanan publik di definisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang di maksud disini adalah warga Negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Kematian, Sertifikat.

Menurut undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan/rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pelayanan publik.

2.1.1 Asas Pelayanan Publik

Menurut pasal 4 UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengemukakan asas-asas pelayanan publik adalah:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif
- g. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

2.1.2 Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan di publikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib di taati oleh pemberi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan atau penerima layanan. Berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur sipil Negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan, sebagaimana di atur dalam undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan public menyatakan komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Persyaratan;
- b. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
- c. Jangka waktu penyelesaian;
- d. Biaya/tariff;
- e. Produk layanan;
- f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan. Di dalam pasal 5 dijelaskan bahwa kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat yaitu: Substantif, administratif, teknis. Di dalam pasal 8 dijelaskan persyarata Administratif dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi standar pelayanan, dan uraian tugas personil kecamatan. Sedangkan standar pelayanan yang dimaksud yaitu, jenis pelayanan, persyaratan pelayanan, proses/prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan, waktu pelayanan dan biaya pelayanan. Standar pelayanan yang dimaksud ditetapkan berdasarkan peraturan bupati/walikota.



2.2 Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun matang dan terperinci, implemetasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan.

Menurut Harsono (2002:67) pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Guntur Setiawan (2004:39) implementasi adalah peluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan, birokrasi yang efektif.

Menurut Majone dan Wildavsky dalam Nurdin Usman (2002:70) pelaksanaan merupakan evaluasi atau perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu dimulainya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang didapat dilaksanakan dengan hak apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2. Sumber daya, dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staff dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implemmenter program.
4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (standar operating procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat program diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dengan faktor lainnya. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang sedang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perseorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

2.3 Konsep Tugas Pokok dan Fungsi

Pembagian tugas dalam suatu lembaga sangat diperlukan untuk memaksimalkan kinerja pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan/dijalankan sesuai dengan apa yang berada dalam ketentuan tersebut.

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

3.1 Tugas Pokok

Tugas pokok dimana pengertian luas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, pemerintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas sebagai suatu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Arti tugas pokok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 1215) adalah sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai. Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa “tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekijat (1998:11), “tugas adalah suatu bagian atau satu unsure atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur elemen atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”

3.2 Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi menurut The Liang Gie dalam Haslinda Zainal (Skripsi: “Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar”, 2008), Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan atau pertimbangan lainnya.

Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi Sutarto dalam buku Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya dengan satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Sedangkan pengertian singkat dari fungsi menurut Moekijat dalam Haslinda (2008:22) yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. Maka dari itu dapat disimpulkan sebuah konsep bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilaksanakan.

Di setiap lembaga pasti terdapat tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah/Bupati setempat. Tugas pokok dan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi (Tupoksi) disini sangat mempunyai peran yang sangat penting salah satunya yaitu sebagai acuan dalam bekerja agar tujuan lembaga dapat terwujud. Fungsi kegiatan yang biasa atau sejenis ditempatkan di dalam suatu unit lembaga. Sistem pembagian kerja sesuai dengan fungsinya merupakan cara yang biasa diterapkan dan dipahami, dengan pembagian kerja yang sesuai dengan kompetensi pegawai maka kinerja pegawai dapat semaksimal mungkin tetapi sebaliknya apabila pembagian tugas tidak sesuai dengan kompetensi pegawai maka pekerjaan yang dikerjakan hasilnya tidakkan memuaskan.

Dalam membagi tugas, pimpinan harus memperhatikan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan yaitu tujuan harus dijabarkan ke dalam tugas-tugas pokok, tugas pokok kemudian dijabarkan ke dalam fungsi, fungsi diikuti dengan kegiatan-kegiatan. Setiap pegawai perlu diberi daftar tugas yang harus dijalankan meskipun tugasnya itu bervariasi namun satu dengan yang lainnya tetap berkaitan dan penempatan kedudukan setiap pegawai haruslah tepat sesuai dengan bidang keahlian, pembawaan, kecakapan dan kemampuannya. Beban tugas dibuat sesama rata mungkin sehingga tercipta keadilan, kepuasan dan kegairahan kerja, serta dalam penambahan ataupun pengurangan pegawai hendaknya berdasarkan kebutuhan dan volume kerja dan penggeseran pegawai haruslah berdasarkan pada penciptaan kondisi kerja yang lebih baik, atau bersifat mendidik. Pembagian tugas yang jelas dalam suatu kantor sangatlah penting, karena dengan adanya pembagian tugas maka



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karyawan atau pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik pula.

Beberapa manfaat pembagian tugas antara lain sebagai berikut:

1) Membantu koordinasi

Memberi tugas pekerjaan kepada unit kerja yang paling baik dapat melaksanakan tugas tersebut akan menyederhanakan koordinasi. Unit-unit kerja yang terpisah dan tidak sama yang membutuhkan koordinasi yang ketat dapat ditempatkan di dalam koordinasi yang sama. Selanjutnya, apabila terdapat sasaran yang jelas dan dominasi yang berhubungan dengan berbagai unit biasanya akan efektif apabila unit-unit tersebut ditempatkan di dalam satu bagian dari struktur organisasi.

2) Memperlancar Pengawasan

Dapat membantu pengawasan dengan menempatkan seorang anggota manajer yang berkompetensi di dalam setiap unit organisasi. Dengan demikian, sebuah unit dapat ditempatkan di dalam organisasi secara keseluruhan sedemikian rupa agar dapat mencapai sasaran kerjanya walaupun lokasinya itu nampak tidak logis. Apabila pekerjaan dari seluruh unit yang berdiri sendiri ingin diawasi oleh unit lain, maka unit tersebut harus ditempatkan pada lokasi yang terpisah.

3) Manfaat Spesialisasi

Konsentrasi kegiatan membantu seorang menjadi ahli di dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu, namun sebagaimana dikemukakan diatas,



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spesialisasi tersebut jangan diadakan terlampau jauh. Mengadakan pembagian tugas atas dasar keahlian memang baik dalam pengorganisasian, terutama apabila dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang bersifat khusus.

4) Menekan pada hubungan antar manusianya

Sebagai ulasan dapat dikemukakan lagi, jangan lupa bahwa di dalam pengorganisasian (supaya efektif) harus memperhatikan hubungan antar manusia. Hal yang menjadi dasar dari pengorganisasian ialah hasil yang dicapai dan itupun tergantung pula dari cara pegawai bekerjasama dan unsur-unsur lain lagi.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembagian pekerjaan merupakan asas umum manajemen yang perlu dilaksanakan pada setiap organisasi. Dengan pembagian kerja yang jelas dan sesuai dengan bidang keahlian, pembawaan, kecakapan serta kemampuan seseorang suatu pekerjaan kantor dapat terselesaikan dengan baik dan akhirnya tujuan suatu lembaga dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Peraturan Bupati Bengkalis No. 38 tahun 2017 Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis merupakan pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas perdagangan dan Perindustrian di Kecamatan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Pengembangan industri kecil dan menengah. Seperti :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melakukan perhimpunan data yang berkaitan Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di kecamatan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa di pasar dan tempat penyimpanan (gudang);
- c. Melaksanakan Pemberdayaan dan perlindungan konsumen dan pelaku usaha;
- d. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Industri kecil dan menengah;
- e. Membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengawasan dan menjaga kebersihan pasar serta pemungutan Retribusi pasar;
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap ASN dan personil UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan menengah; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas .

Industri kecil merupakan industri yang tergolong dalam batasan usaha kecil, menurut undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, di kuasai, atau menjadi bagian baik langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil dalam undang-undang ini.

Di dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria yang di definisikan UMKM seperti tercantum dalam pasal enam adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan.

Menurut Tambunan (1999) industri kecil merupakan kegiatan industri yang dikerjakan di rumah-rumah penduduk yang pekerjaannya merupakan anggota keluarga sendiri yang tidak terikat jam kerja dan tempat.

Karakteristik industri kecil disebut antara lain sebagai berikut :

- a. Proses produksi lebih *mechanized* dan kegiatannya dilakukan di tempat khusus (pabrik) yang biasanya berlokasi di samping rumah si pengusaha atau pemilik usaha.
- b. Sebagian tenaga kerja yang bekerja di industry kecil adalah perkerja bayaran (*wage labour*)
- c. Produk yang dibuat termasuk golongan barang-barang yang cukup *sophisticated*.

Menurut Mccgill (1997:261) dalam Muh. Ridwan (Jurnal: “pembinaan industry kecil dan menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang” 2014) pengembangan adalah suatu perubahan dari mikro ke makro. Secara makro pengembangan merupakan suatu peningkatan kualitas kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa, proses peningkatan mencakup perencanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan dan pengelolaan pegawai nuk mencapai suatu hasil yang optimal, hasil ini dapat berupa jasa, benda atau uang.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan industri kecil sampai saat ini antara lain, adalah:

- a. Dari segi pengusaha dan pengrajin
 - Kurangnya pengetahuan para pengusaha/pengrajin akan permintaan pasar yang meliputi jenis produk, mutu, jumlah, waktu penyerahan dan harga yang diinginkan.
 - Kurangnya pengetahuan mengenai sistem produksi, sistem manajemen, termasuk keuangan dan pemasaran.
- b. Dari segi pembinaan
 - Terbatasnya kemampuan aparat departemen perindustrian.
 - Belum lengkapnya sarana pembinaan (Unit Pelaksana Teknis)



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.4 Pandangan Islam

Pentingnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja dalam sebuah organisasi. Salah satu ayat alquran yang berkaitan tentang pentingnya kerja. Allah berfirman dalam surat At- Taubah 105 :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٠٥

Artinya: “ dan katakanlah: bekerjalah kamu, dan Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaan itu, kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu beritakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At- Taubah 105).

Dengan kata lain islam sangat membenci pada orang yang malas dan tergantung pada orang lain. Sikap ini di perhatikan Umar Bin Khattab ketika mendapati seorang sahabat yang selalu berdoa, tidak mau bekerja. “ janganlah seorang kamu duduk dan malas mencari rezki kemudian iya mengetahui langit tidak akan menghujankan emas dan perak. Rasulullah pun senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhi sifat malas, sifat lemah, dan berlindung dari Allah penakut dan sangat tua dan saya berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari ujian hidup dan mati (HR.Abu Daud).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Astrella Janice (2015) tentang “PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (BPMD) DALAM PEMBANGUNAN DESA DIDESA TANJUNG LAPANG KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU” Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh BPMD sejauh ini sudah cukup baik, hal ini terlihat dari upayanya dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa Tanjung Lapang. BPMD telah melakukan beberapa program pembangunan desa, contohnya pengaspalan jalan, pembangunan siring sungai, pembangunan jembatan, pemeliharaan insfastruktur desa, bantuan bibit, pupuk dan pestisida bagi petani.

Selain itu, penelitian yang tulis oleh M. Firmansyah (2016) tentang “ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN KAMPAR” penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kabupaten Kampar dalam keadaan kurang maksimal. Karena pegawai belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, kemudian masih kurang tanggapnya pegawai dalam merepon

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas yang di berikan, hal ini mungkin di akibatkan karena kurangnya pelatihan yang di berikan oleh pemerintah.

Selain itu, Jurnal yang di tulis oleh mada sutapa(2014) membahas tentang “PELAKSANAAN TUGAS POKOK, FUNGSI PEGAWAI KANTOR DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN” penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta dalam melaksanakan desentralisasi pemerintah daerah telah membuat perubahan struktu organisasi dan tupoksi pegawai, karena kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan pemahanman tupoksi pegawai di dinas pendidikan dan pengajaran kota Yogyakarta sudah baik karena pegawai memahami tupoksi yang melekat pada dirinya dan ada kesesuaian antara tupoksi dengan pekerjaan atau jabatan yang disandangnya.

2.6 Definisi Konsep

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah rencana yang telah di rancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. maksud nya adalah upaya dari kantor UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dalam mengimplementasikan program yang direncanakan sebelumnya. Dalam pelaksanaan ini tentu ada hambatan yang dilalui untuk mencapai target yang telah di tetapkan.

2. Tugas

Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan yang khusus.

3. Fungsi

Sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat dan pelaksanaannya.

4. Pencapaian tujuan

Dalam hal ini apakah program yang telah disusun,dan telah dilaksanakan dengan semestinya sudah tercapai dengan semestinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep operasional

Konsep operasional dari penelitian

yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis” adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Bupati Bengkalis No. 38 tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan. BAB III Pasal 7	a. Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa di pasar; 1.1 Pengawasan Berkala 1.2 Pengawasan Khusus
	b. Pembinaan	1. Melakukan pembinaan industri kecil ; 2. Melakukan pembinaan industri menengah
	c. Pengembangan	1. Melaksanakan Pengembangan Industri kecil ; 2. Melaksanakan Pengembangan Industri Menengah;

Sumber : Peraturan Bupati Bengkalis No. 38 tahun 2017

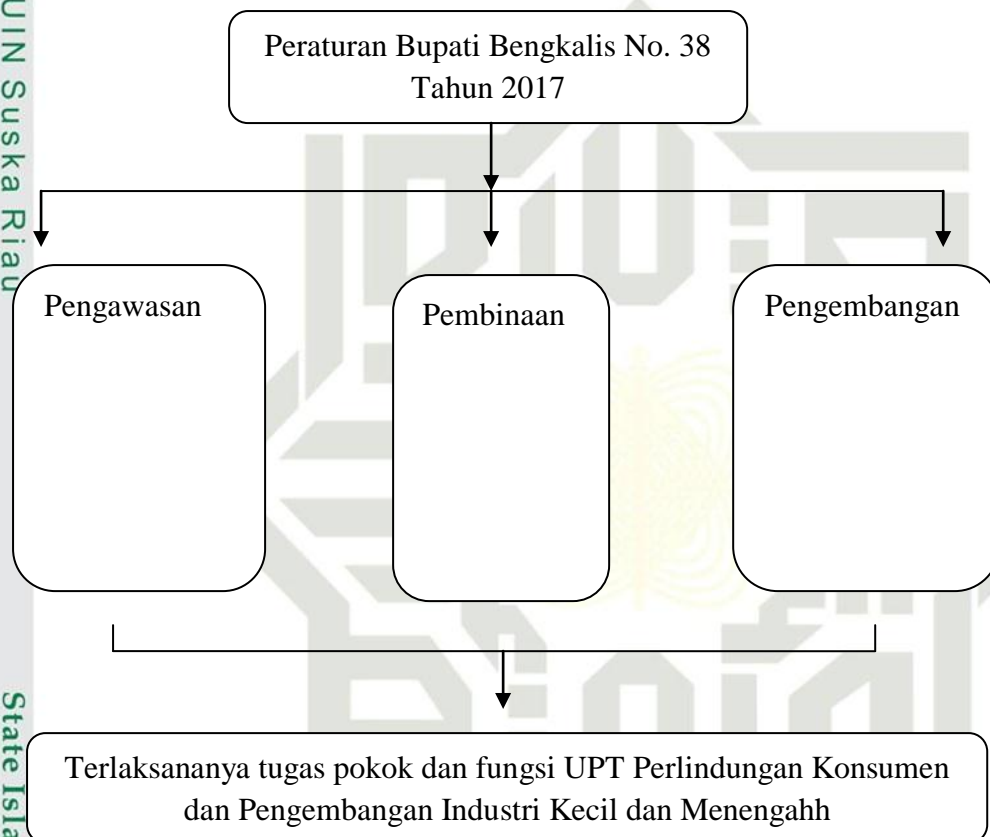
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8

Kerangka Pemikiran

Konsep pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: peraturan Bupati Bengkalis No.38 Tahun 2017

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Waktu dilakukan penelitian ini pada bulan Januari sampai Mei 2019.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian Deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih (dependen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Variable mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel dependen yang selalu di pasang dengan variabel dependen (Sugiono, 2008: 11).

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendefinisikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Dalam penelitian ini tentang tugas pokok dan fungsi

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hususnya dalam pelaksanaannya. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau objek studi. Proses penelitian tersebut memperhatikan konteks studi dengan menitik beratkan pada pemahaman, pemikiran persepsi peneliti.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan dari informan penelitian yang meliputi: Data Tugas Pokok dan Fungsi kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang di peroleh dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang sifatnya mendukung hasil penelitian ini yang meliputi :

- a. Gambaran umum tentang Kabupaten Bengkalis;
- b. Struktur organisasi pemerintah di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis;
- c. Keadaan dan jumlah pegawai di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Mekanisme dan kinerja pegawai Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis;
- e. Dan data-data yang menyangkut dengan permasalahan penelitian ini.

3.4 Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif menjadi hal yang penting karena informasi yang akan digunakan dalam analisis data berasal dari informan penelitian. Data primer yang di kumpulkan oleh peneliti berasal dari wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan informan. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja dengan pertimbangan tertentu. Kemudian teknik accidental sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan kebutuhan.

Tabel 3.1 Daftar Informan penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis	1
2	Kelompok Jabatan Operasional	3
3	Pengusaha Industri Kecil dan Menengah	10
4	Pedagang di pasar	10



5.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Sutrisno (2010:145). Atau dengan kata lain suatu penyelidikan yang di jalankan secara sistematis dan dengan menggunakan indra terutama mata terhadap kejadian-kejadian yang langsung. Jadi disini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi sasaran penulis untuk melakukan pengamatan adalah UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri kecil dan menengah kecamatan siak kecil kabupaten Bengkalis.

2. Wawancara

Wawancara (interview) yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan Tanya jawab kepada Informan seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Sebagaimana interview dan wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada kepala UPT, Kolompok Jabatan Fungsional di UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dan masyarakat Kecamatan Siak Kecil.

3. Dokumentasi

Yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang didapat di UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri kecil dan menengah kecamatan siak kecil kabupaten Bengkalis.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyusunan agar dapat di tafsirkan sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu yang bersifat deskriptif. deskriptif adalah analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan mengenai pelaksanaan pelayanan kantor UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri kecil dan menengah kecamatan siak kecil kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, di pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, (Aritko,1993:209).

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang di peroleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses analisi yang dilakukan merupakan proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara dan observasi yang di peroleh kemudian di catat dan dikumpulkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

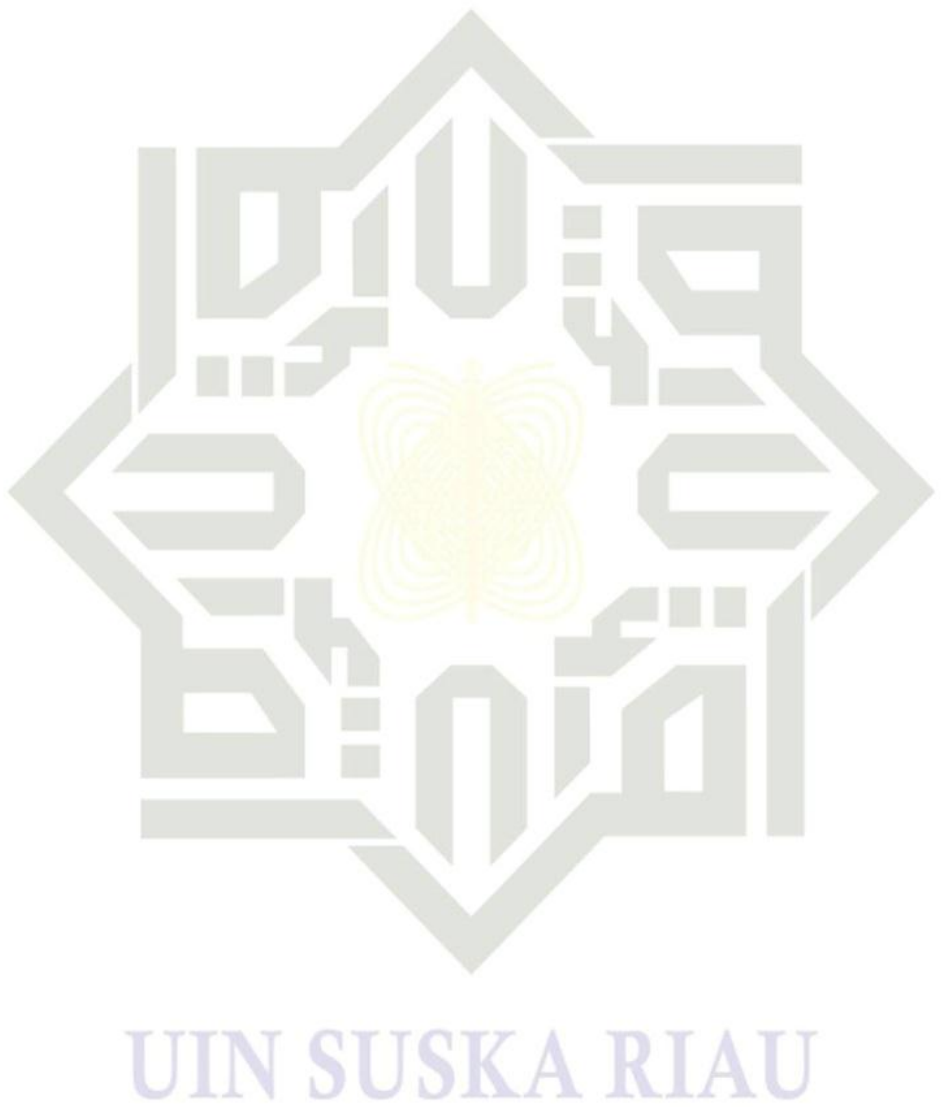
sehingga menjadi sebuah catatan lapangan yang kemudian nantinya di olah menjadi data penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

1.1.1 Sejarah Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis dengan ibu kota Bengkalis merupakan salah satu dari sebelas Kabupaten/ kota di Provinsi Riau, wilayahnya mencakup daratan bagian pesisir timur pulau sumatra. Secara geografis, posisi wilayah kabupaten Bengkalis pada posisi $2^{\circ} 30' - 0^{\circ} 17'$ lintang utara dan $100^{\circ} 52' - 102^{\circ} 10'$ bujur timur, wilayah kabupaten Bengkalis terdiri dari pulau dan daratan serta memiliki kawasan pesisir dan laut dengan garis pantai sepanjang 446 KM yang berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan selat melaka
2. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Sebelah barat dengan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu
4. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten kepulauan meranti

Kabupaten bengkalis memiliki letak yang sangat strategis, berada di tepi alur pelayaran internasional, yang paling sibuk di dunia, yakni selat melaka serta berada di kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi indonesia-malaysia-singapura (IMS-GT).



Luas Kabupaten Bengkalis 7.793,93 KM² yang terbagi dalam 8 kecamatan Dan 102 desa/kelurahan.

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis

Visi kabupaten bengkalis 2016-2021 “terwujudnya kabupaten bengkalis sebagai model negeri maju dan makmur di indonesia”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi kabupaten bengkalis yaitu:

1. Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
3. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat

Dalam rangka menjadikan kabupaten bengkalis sebagai negeri yang maju dan makmur, kabupaten bengkalis akan menjadi 4 pusat kegiatan pembangunan secara spasial yakni:

- a. Gerbang utama. Fokus menjadikan pulau bengkalis menjadikan pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat pengembangan budaya melayu serumpun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta miliknya UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Gerbang laksemana. Fokus menjadikan kecamatan bukit batu dan kecamatan Siak Kecil sebagai kawasan industri wisata religius serta pelabuhan ekspor impor, pusat pengembangan pertaanian, perkebunan dan peternakan modern yang pro rakyat.
- c. Gerbang permata. Fokus menjadikan kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai pusat pengembangan industri pertambangan, perdagangan, ketenagakerjaan, peternakan, pertanian dan perkebunan.
- d. Gerbang pesisir. Fokus untuk menjadikan pulau rupa sebagai pusat pariwisata keunggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.

4.2 Sejarah singkat UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Awal Mula terbentuknya UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Pelaksana Teknis Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian se-Kabupaten Bengkalis.

Maka di bentuklah Unit Pelaksana Teknis perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Berkedudukan di Desa Lubuk Muda dengan Klasifikasi Kelas B, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Siak Kecil.

4.2.1 Visi dan Misi UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah merupakan pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian maka Visi dan Misi mengacu kepada Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis. Yaitu :

Visi

“ Terwujudnya Sektor Industri dan Perdagangan sebagai penggerak utama ekonomi Kabupaten Bengkalis” Pada Tahun 2035

Misi :

1. Mengwujudkan industry dan perdagangan sebagai salah satu Odinamisator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis.
2. Mengwujudkan industry kecil dan menengah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meningkatkan kelancaran distribusi, penggunaan produk dalam negeri, perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan.
4. Mengwujudkan pelayanan prima dan good governance.
5. Mengwujudkan partisipasi stake holder dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Fungsi suatu struktur dalam organisasi bertujuan memberikan informasi kepada seluruh manusia yang menjadi anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus ia kerjakan, berkonsultasi atau bertanggung jawab kepada siapa, sehingga proses kerja sama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

UPT perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Menggunakan struktur organisasi lini, wewenang dari atasan di salurkan secara vertical kepada bawahan. Begitu juga sebaliknya, pertanggungjawaban dari bawahan secara langsung ditujukan kepada atasan yang memberi perintah ini sesuai yang di tertera di Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2017 yang terdiri dari kepala Unit



Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan fungsional . Untuk bagannya dapat di lihat halaman lampiran.

4.2.4 Uraian Tugas dan Fugsi

1. Kepala Unit pelaksana Teknis

Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

- a. Melakukan perhimpunan data yang berkaitan Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di kecamatan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa di pasar dan tempat penyimpanan (gudang);
- c. Melaksanakan Pemberdayaan dan perlindungan konsumen dan pelaku usaha
- d. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Industri kecil dan menengah;
- e. Membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengawasan dan menjaga kebersihan pasar serta pemungutan Retribusi pasar;
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

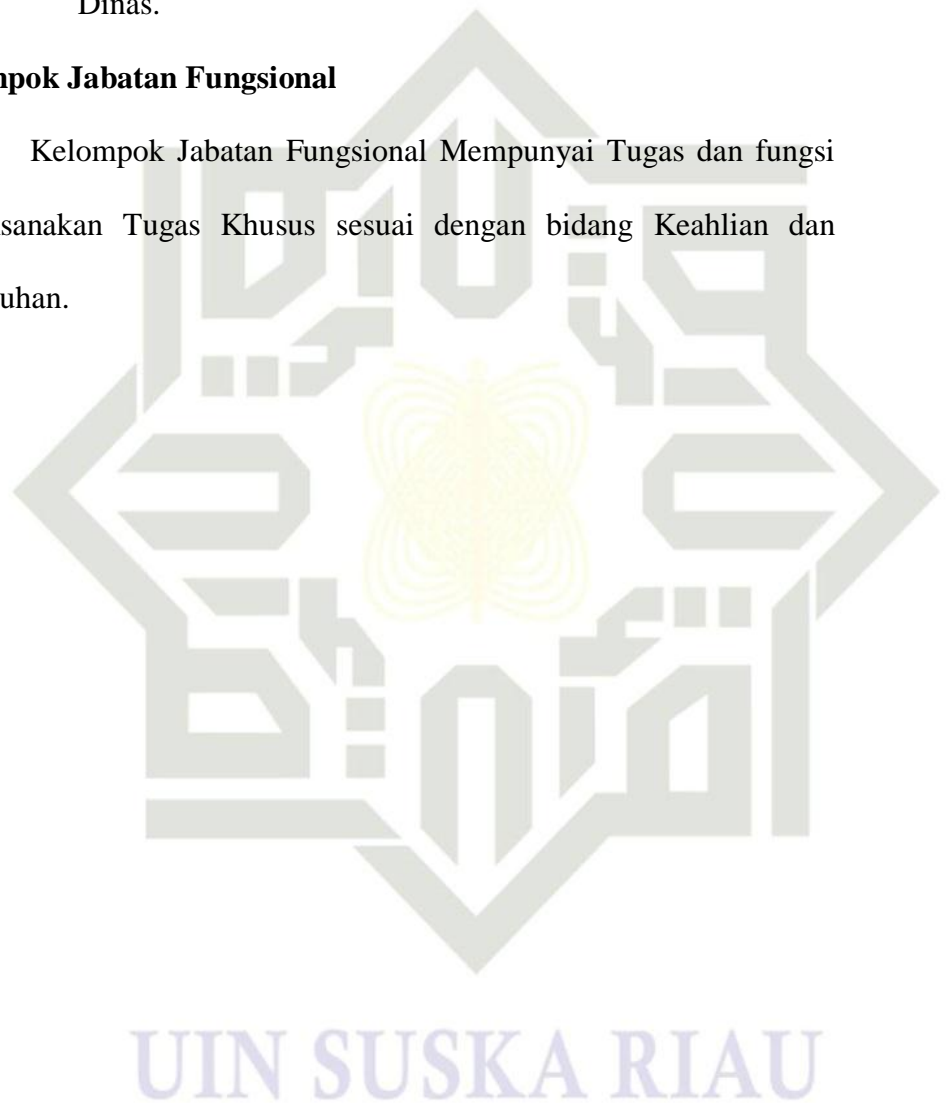
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap ASN dan personil UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan menengah; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai Tugas dan fungsi melaksanakan Tugas Khusus sesuai dengan bidang Keahlian dan Kebutuhan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi dan hambatan UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil dalam hal pengawasan, pembinaan dan pengembangan dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Pengawasan barang beredar dipasar belum maksimal dilakukan karena masih banyak pasar-pasar yang jauh dari kecamatan tidak meendapatkan pengawasan. Untuk Pembinaan dan Pengembangan terhadap Industri Kecil masih belum maksimal ini terlihat masih banyaknya industri kecil yang tidak terdaftar sehingga tidak mendapatkan program-program pembinaan. UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil hanya mengirim para IKM untuk mengikuti pelatihan di kabupaten tanpa membuat program pelatihan untuk kecamatan .
2. hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil yang penulis dapat kan yaitu hambatan dalam hal sumber daya manusia, keterampilan (skill), sarana dan prasarana dan dana.

6.2 Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan Kesimpulan diatas, Penulis dapat memberikan sumbangan pikiran sebagai berikut:

1. Pihak UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Perlu membuat suatu daftar pedagang-pedagang yang sudah di lakukan pengawasan sehingga pedagang – pedagang yang belum dilakukan pengawasan dapat dilakukan dilain hari sehingga pengawasan yang dilakukan dapat terjangkau untuk semua para pedangang yang berjualan di pasar.
2. Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan, Pembinaan dan pengembangan perlu adanya penambahan aparat atau pesonil.
3. perlu adanya koordinasi pemerintah melalui UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil ini melakukan koordinasi dengan pemerintahn desa agar para ikm-ikm di desa nya mendapatkan pelatihan sehingga IKM tersebut dapat berkembang.
4. Pemerintah kabupaten harus memberikan dana atau anggaran yang lebih agar pembinaan dan pengembangan dapat di lakukan di kecamatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

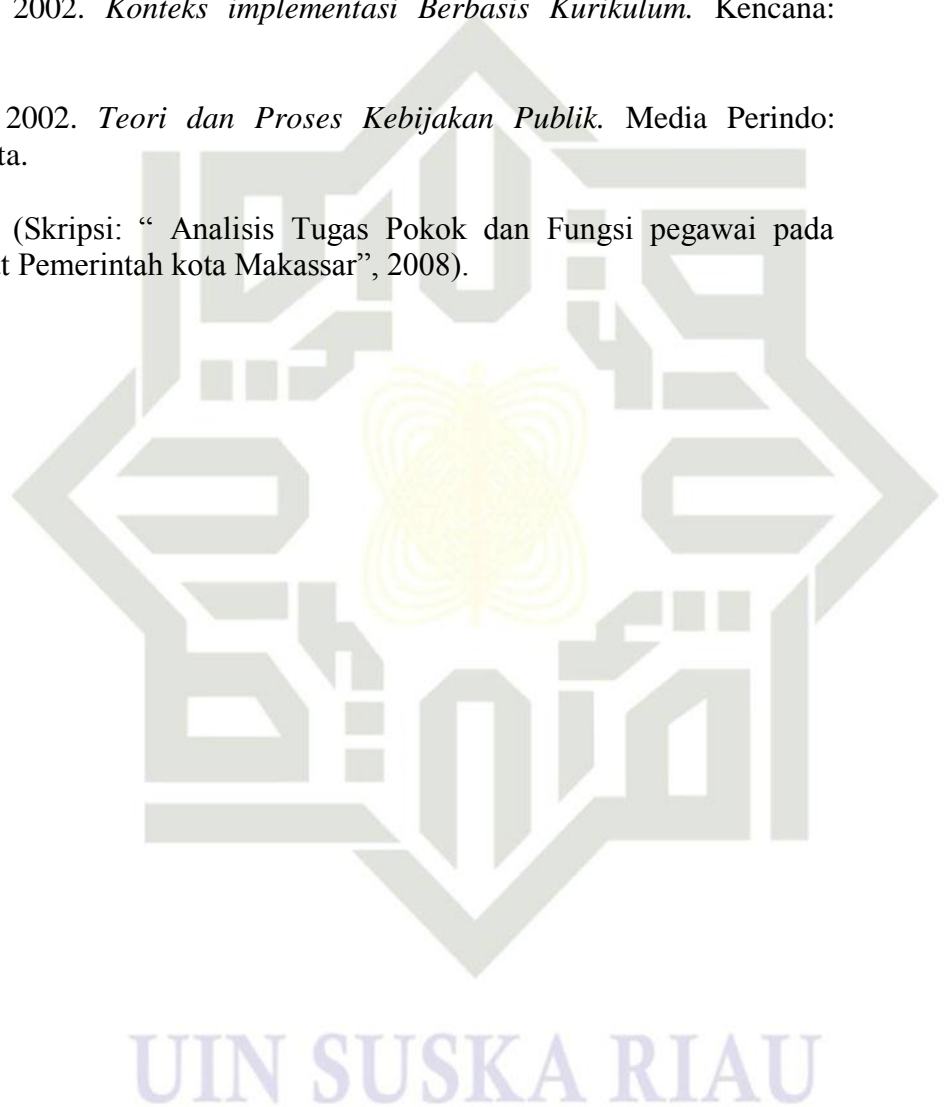
DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Diponegoro: Bandung.
- Dunn, N. Wiliam. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Graha Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Padirianto. Adhe Filima, Hakam Moehammad Soe'oad. 2018. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol.58 No.1.
- Gibson, James. L. 1997. *Manajemen*. Alih bahasa Zuhad Ichyandin: Ed 9. Erlangga: Jakarta.
- Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Moekijat.1998. *Pembagian Tugas dalam Pemerintahan*.Alfabeta: Bandung.
- Peraturan Bupati Bengkalis No. 38 Tahun 2017 *Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah se kabupaten Bengkalis*.
- Ridwan. Muh, Hartuningsih, mass'ad Hatuwe. 2014. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang. *Jurnal Administrative Reform*. Vol.2 No. 2: 189-191.
- Setiawan. Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suharno. 2010. *Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus T.H. 1999. *Perkembangan industri skala kecil di Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Amun, Tulus T.H. 2009. *Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 20, Tahun 2008, *Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks implementasi Berbasis Kurikulum*. Kencana: Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Perindo: Yogyakarta.
- Zaini, Haslinda (Skripsi: “ Analisis Tugas Pokok dan Fungsi pegawai pada Sekretariat Pemerintah kota Makassar”, 2008).



DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPT

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL

DAN MENENGAH KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS

Oleh

Nama: **HERLIANSYAH**

Nim: **11575103093**

1. UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

A. Pengawasan

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan dalam pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar yang ada di pasar dan tempat penyimpanan ?
2. Bagaimana bentuk pengawasan yang di lakukan?
3. Berapa kali dalam satu bulan turun kelapangan untuk melakukan pengawasan?
4. Selama melakukan pengawasan, apakah masih terdapat pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh penjual? Dan apa tindakan yang dilakukan UPT perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah terhadap pelanggaran tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah mengalami kendala atau hambatan dalam melakukan pengawasan?

B. Pembinaan

1. Apakah yang menjadi tujuan UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil yang ada di kecamatan Siak Kecil?
2. Bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah untuk pelaku industri kecil?
3. Apakah dalam melakukan pembinaan ada melakukan kerja sama dengan instansi lain ?
4. Apakah UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah mengalami kendala atau hambatan dalam melakukan pembinaan?

C. Pengembangan

1. Bagaimana upaya UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dalam pengembangan Industri kecil?
2. Apakah ada program-program yang dibuat oleh UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah untuk pengembangan industri kecil?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana upaya UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah untuk membantu memasarkan produk-produk Industri kecil?
4. Apakah UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah kecamatan siak kecil mengalami kendala atau hambatan dalam melaksanakan pengembangan ?

2. Pedagang dan Pengusaha Industri Kecil

A Pengawasan

1. Menurut bapak adakah dari pihak UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melakukan pengawasan ?
2. Apakah bapak mengetahui bentuk pengawasan yang di dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah?
3. Berapa kali dalam sebulan upt melakukan pengawasan?
4. Menurut bapak pengawasan yang di lakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sudah efektif atau belum?

B Pembinaan

1. Apakah bapak pernah mengikuti program pembinaan yang di selenggarakan pihak UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah?

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Pengembangan

2. Bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan pihak UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah?
 3. Apakah pihak UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pernah melakukan pembinaan sumber daya manusia?
 4. Bagaimana tanggapan bapak terhadap pelaksanaan pembinaan yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah?
1. Apakah ada program-program yang di tawarkan pemerintah melalui UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah untuk pengembangan industry bapak?
 2. Apakah UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah membantu industry bapak dalam pemasaran produk-produk yang bapak hasilkan?
 3. Dalam hal produksi apakah ada bantuan dari pemerintah melalui UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi?
 4. Apakah bapak merasa program-program yang di lakukan UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah membantu bapak dalam hal pengembangan industri bapak ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

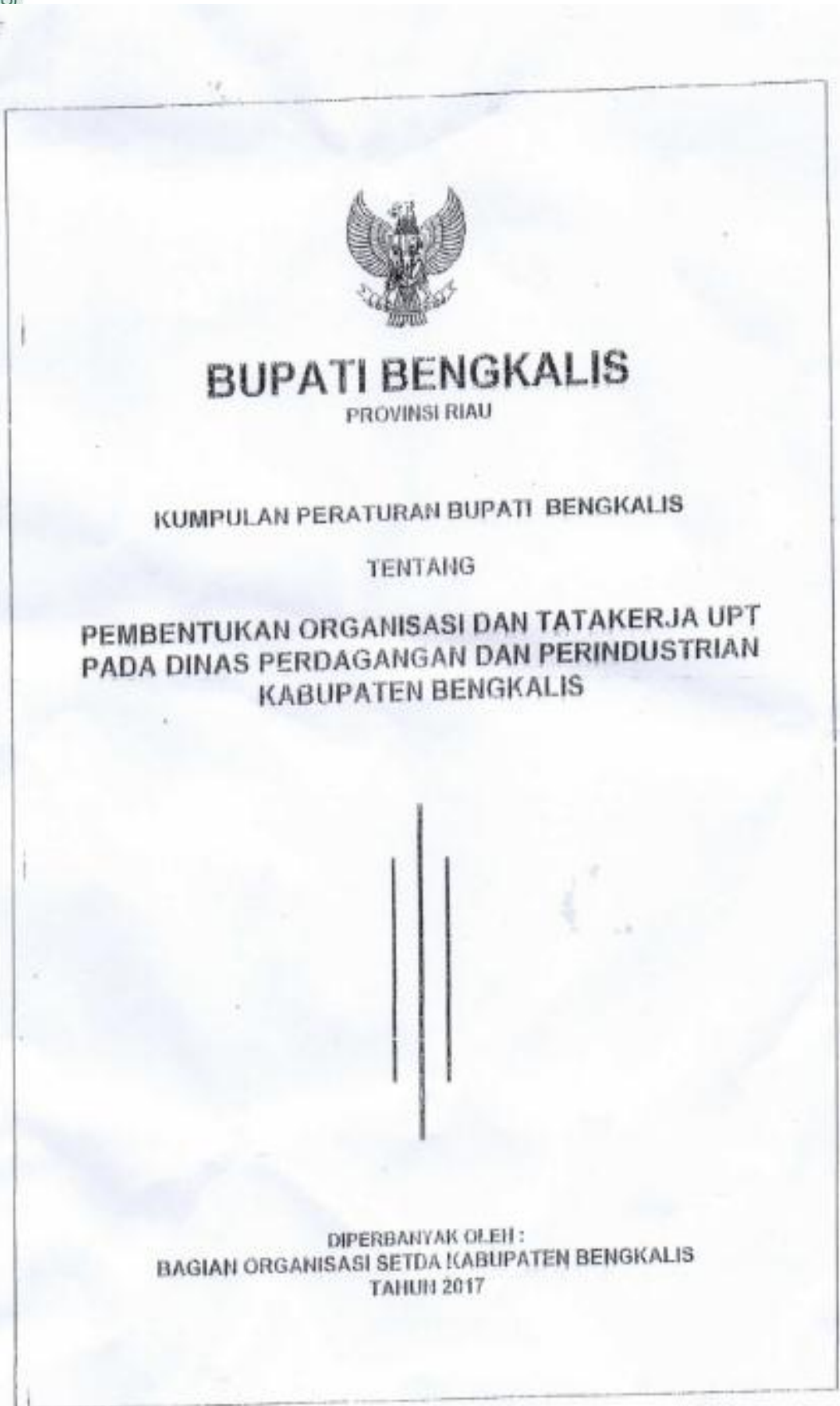
**Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen
dan Pengembangan Industri kecil dan Menengah Kecamatan Siak**

Kecil Kabupaten Bengkalis

KEPALA UPT	
SYAMSIR, S.Pd	
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
1. AFRIANTO, S.Sos 2. INDRA DARMAWAN 3. ADI SAPUTRA 4. SISWANDI	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

1. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN
2. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UPT METROLOGI LEGAL



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN PADA DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN SE-KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian se-Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2 -

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tatakerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SE-KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis;
5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3 -

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian se-Kabupaten Bengkalis.

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), terdiri dari;

- a. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Bengkalis pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Bengkalis dengan Klasifikasi Kelas B, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Bengkalis;
- b. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Bantan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Selat Baru dengan Klasifikasi Kelas B, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Bantan;
- c. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Bukit Batu pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Sungai Pakning dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Bandar Laksamana;
- d. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Lubuk Muda dengan Klasifikasi Kelas B, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Siak Kecil;



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4 -

- e. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupatén Bengkalis berkedudukan di Duri dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Pinggir pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Pinggir dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau;
- g. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Rupert pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Batu Panjang dengan Klasifikasi Kelas B, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rupert; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Rupert Utara pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Tanjung Medang dengan Klasifikasi Kelas B, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rupert Utara.

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan wilayah kerja terdiri dari satu Kecamatan atau lebih.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Kelas A, terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Kelas B, terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5 -

- (3) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis kelas A dan kelas B sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan data yang berkaitan Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa di pasar dan tempat penyimpanan (gudang);
- c. melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan konsumen dan pelaku usaha;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah;
- e. membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengawasan dan menjaga kebersihan pasar serta pemungutan retribusi pasar;
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap ASN dan personil UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan pelaporan;
- b. membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan tata usaha dan administrasi keuangan;



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6 -

- c. membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
- d. membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis dan sumber dana lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI TATAKERJA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7 -

Pasal 12

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan sistem pengendalian internal di Unit Pelaksana Teknis yang dipimpinnya.

BAB VII ESELONERING

Pasal 13

Jabatan Eselonering pada Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Klasifikasi Kelas A merupakan jabatan eselon IV/a;
- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Klasifikasi Kelas B merupakan jabatan eselon IV/b; dan
- c. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV/b.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku, Pejabat yang lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat yang baru.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8 -

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 26 Mei 2017

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 26 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. ARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017 NOMOR 38



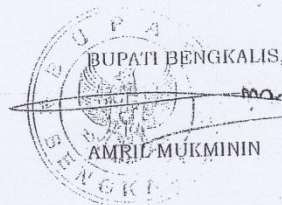
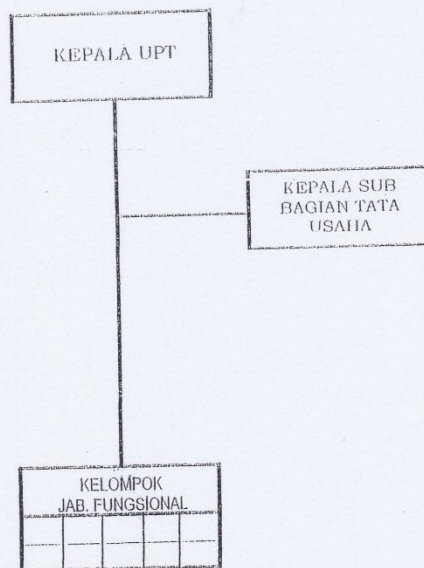
Han Vripa Ummuulung Ummuulung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH DI KECAMATAN SE-
KABUPATEN BENGKALIS

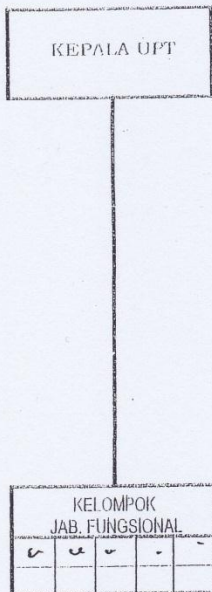
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI
KECAMATAN KABUPATEN BENGKALIS KELAS A



- Han Vripa Ummuulunggi Ummuulunggi Ummuulunggi
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH DI KECAMATAN SE-
KABUPATEN BENGKALIS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI
KECAMATAN KABUPATEN BENGKALIS KELAS B



DOKUMENTASI



Ket : wawancara pak syamsir kepala UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket : wawancara pak Afrianto kelompok Jabatan fungsional UPT
Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kecamatan Siak Kecil.



Ket: wawancara dengan para pedagang yang ada di pasar-pasar di Kecamatan Siak Kecil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket: wawancara dengan para pedagang yang ada di pasar-pasar di Kecamatan Siak Kecil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



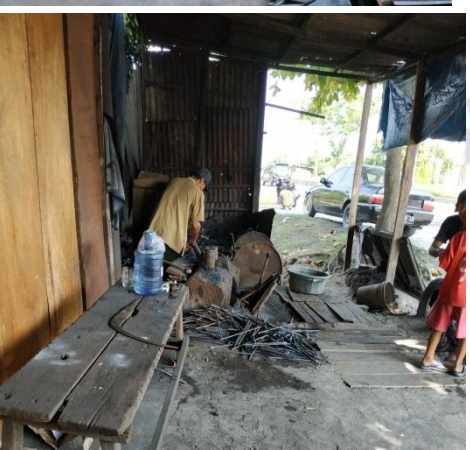
Ket: wawancara dengan para pedagang yang ada di pasar-pasar di Kecamatan Siak Kecil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket: wawancara dengan salah satu Pelaku Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Kecil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ket: wawancara dengan salah satu Pelaku Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Kecil



Ket: Pelaku Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Kecil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket: Beberapa pelatihan yang dia adakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1342/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 08 Februari 2019 M
2 Jumadil Akhir 1440 H

Kepada
Yth. Candra Jon Asmara, S.Sos, M.S
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Herliansyah
NIM : 11575103093
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi UPT. Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

- Han Uipya Ummuulunggi Ummuulunggi
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1341/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 08 Februari 2019 M
2 Jumadil Akhir 1440 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

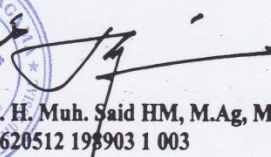
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Herliansyah
NIM. : 11575103093
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi UPT. Perlindungan
Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan
Siak Kecil Kabupaten Bengkalis" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara
berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 196903 1 003

- Han Uipya Ummuulunggi Ummuulunggi
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-Riset/18379
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1341/2019 Tanggal 8 Februari 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

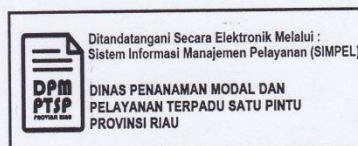
1. Nama : HERLIANSYAH
2. NIM / KTP : 11575103093
3. Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS
7. Lokasi Penelitian : UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Februari 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan

Han Vripa Ummuunggi Ummuunggi Ummuunggi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28751
Telepon. 0766 - 23615, 0766 - 7018510 Fax. 0766 - 23615 E-mail : Website : www.bengkalis.go.id

Bengkalis, 21 Februari 2019

Nomor : 061/DPMPSP-JU/II/2019/74
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Kepada :
Yth. Kepala UPT. Perlindungan Konsumen
dan Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah Kecamatan Siak Kecil
Kabupaten Bengkalis
di-

Lubuk Muda

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis,
memperhatikan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/18379 tanggal 11 Februari 2019
tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi,
dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : HERLIANSYAH
NIM : 1157103093
Program Studi : Administrasi Negara
Universitas : UIN Suska Riau
Jenjang : S1
Alamat : Pekanbaru

Bermaksud mengadakan riset / pra riset dalam rangka penulisan skripsi :

1. Judul :
"Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi UPT Perlindungan Konsumen dan
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis".
2. Lokasi Penelitian :
UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis
3. Penelitian ini berlangsung selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi
ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara,
mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan
sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS



BASUKI RAHMAD, AP, M. Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19750619 199503 1 003

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
2. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Yth. Kepala DISPERINDAG Kabupaten Bengkalis;
4. Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru;
5. Yang Bersangkutan.

Han Vripa Ummuungri Ummuungri Ummuungri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KECAMATAN SIAK KECIL

Jalan : Ismail Yusuf No. 09 Lubuk Muda Kode Pos 28761

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071/UPT PKPIKM-SK/VI/2019/09

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSIR, S.Pd
Nip : 19691031 199909 1 001
Pangkat/ Gol : Penata
Jabatan : Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Unit Kerja : Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Bengkalis

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HERLIANSYAH
NIM : 115751103093
Tempat/Tgl.Lahir : Bengkalis, 01 Januari 1997
Program Study : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEKONSOS)
Perguruan Tinggi : UIN SUSKA RIAU

Telah selesai melakukan penelitian pada UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah mulai tanggal 08 Januari s/d 28 Februari 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Muda, 14 Juni 2019

Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan
Pengembangan IKM
Kecamatan Siak Kecil



SYAMSIR, S.Pd
Nip. 19691031 199909 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Herliansyah, Panggilan Heru, Lahir di Bengkalis pada tanggal 01 Januari 1997 dari Pasangan suami Istri Bapak Zanirwan dan ibu Herlina. Peneliti adalah anak Pertama dari tiga bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Perumahan Surya Graha Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 8 Bukit-Batu (sekarang SDN 1 Bandar Laksemana) desa Api-Api Kabupaten Bengkalis, lulus tahun 2009, SMPN 2 Bukit-Batu (sekarang SMPN 1 Bandar Laksemana) desa Api-Api Lulus Tahun 2012, SMAN 1 Bukit-Batu desa Sejangat Lulus Tahun 2015, dan mulai tahun 2015 Mengikuti Program S1 Administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sampai dengan penulisan Skripsi ini Peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Peneliti Melakukan Penelitian di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan Judul “**Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis**”. Penulis dinyatakan lulus pada Sidang Munaqasah pada Tanggal 27 September 2019 dengan Predikat *Sangat Memuaskan* serta berhak menyandang gelar Sarjana Administasi Negara (S.Sos).